

**TINJAUAN HUKUM ISLAM SECARA KOMPREHENSIF TERHADAP
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**FAISAL ABDAOE
NPM. 1421020068**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM SECARA KOMPREHENSIF TERHADAP
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**FAISAL ABDAOE
NPM. 1421020068**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.
Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Negara telah mengatur mengenai Kewajiban dan Larangan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam Lapas maupun Rutan. Namun, Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam praktek atau pelaksanaan terhadap Undang-Undang dan Permenkumham tersebut masih banyak terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperhatikan dan juga warga binaan pemasyarakatan yang kurang taat pada aturan maupun oknum-oknum yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Hukum Islam telah mengatur segala perbuatan manusia serta peraturan-peraturan yang semuanya bersumber dari Al-Qur'an ataupun Hadits. Di dalam hal ini Hukum Islam juga mengatur tentang keadilan seorang pemimpin baik dalam membuat sebuah aturan ataupun dalam pelaksanaan aturan tersebut

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan Menurut Permenkumham No. 6 Tahun 2013 dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan permenkumham nomor 6 tahun 2013 di Indonesia

Penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*). Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari Al-Qur'an, Al-hadits, Kitab-kitab Hukum, Undang-undang No.12 Tahun 1995 dan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia. Data sekunder dari sumber pendukung dari primer yang berasal dari jurnal, internet maupun data-data tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, *koding*, dan *sistematisasi*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia adalah aturan yang harus ditaati dan ditegakkan oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Namun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh kurangnya atau minimnya sarana dan prasarana yang ada didalam Lapas atau Rutan, narapidana serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah selaku pembuat aturan harus lebih tegas dalam menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut sehingga Tata Tertib yang ada di Lapas maupun Rutan dapat terlaksana dengan baik demi terciptanya keadilan bagi sesama narapidana. Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan menganjurkan untuk bersikap baik terhadap narapidana dengan memenuhi hak-hak dan kewajibannya. Sedangkan bagi narapidana itu sendiri wajib menaati aturan-aturan yang ada di Lapas maupun Rutan. Hal itu demi terciptanya kemaslahatan bersama.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Faisal Abda'oe

NPM : 1421020068

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Secara Komprehensif
Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.
6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan
Di Indonesia

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

NIP. 195703051978031001

NIP. 197512302003121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM SECARA KOMPREHENSIF TERHADAP PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN DI INDONESIA"** disusun oleh: **Faisal Abda'oe, NPM. 1421020068, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 28 Agustus 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I, M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)



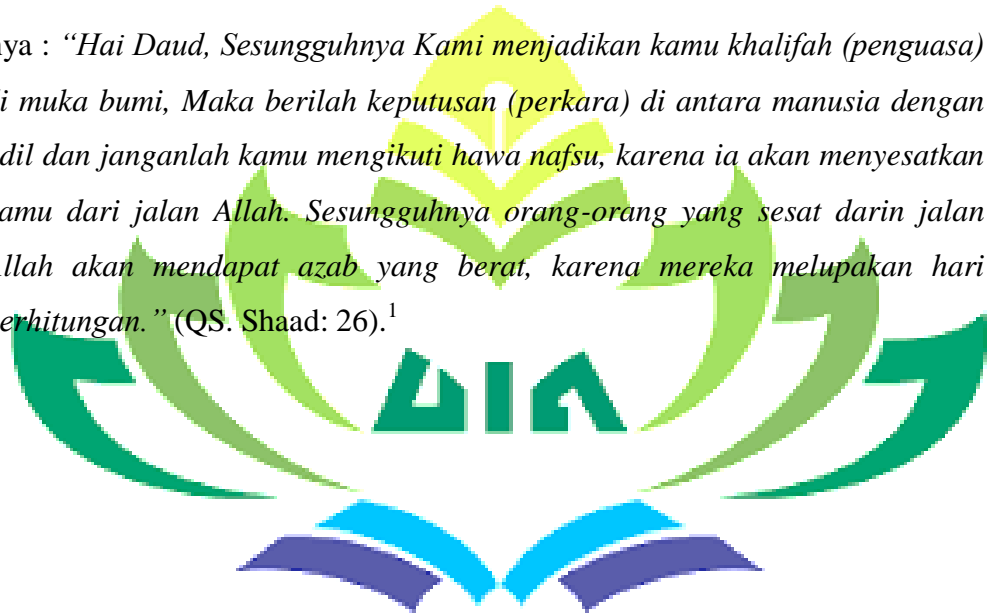
MOTTO

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى

فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا

نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shaad: 26).¹

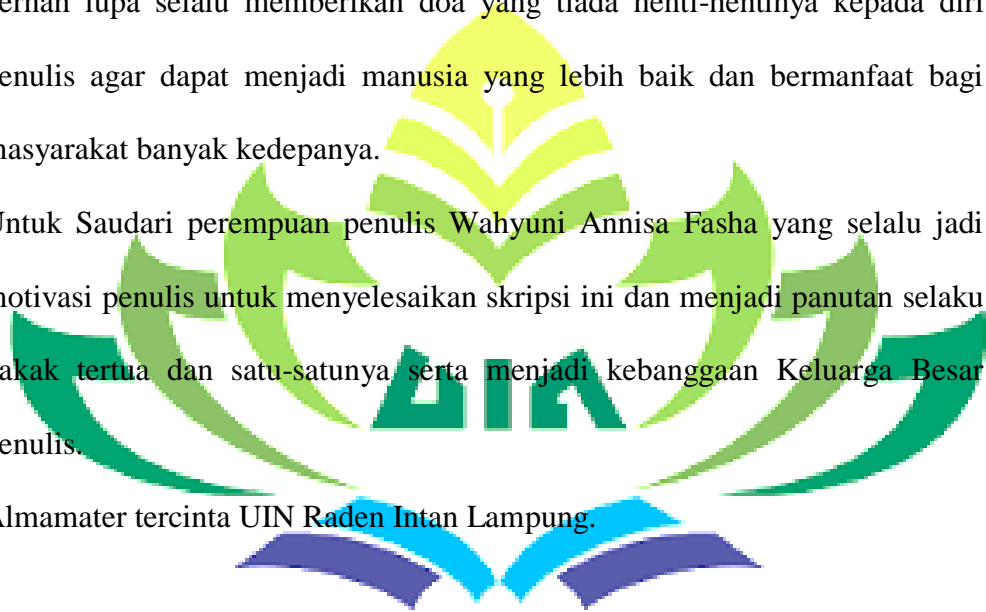


¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm. 453.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi motivasi hidup penulis pribadi guna menjadi manusia yang lebih baik, diantaranya:

1. Kedua Orangtuaku Bapak Mahyudin dan Ibu Lela Hasni yang senantiasa penulis cintai dan banggakan yang selama ini juga telah mendidik, membimbing, serta memberikan motivasi baik moril maupun materil dan tak pernah lupa selalu memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada diri penulis agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak kedepanya.
2. Untuk Saudari perempuan penulis Wahyuni Annisa Fasha yang selalu jadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi panutan selaku kakak tertua dan satu-satunya serta menjadi kebanggaan Keluarga Besar penulis.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

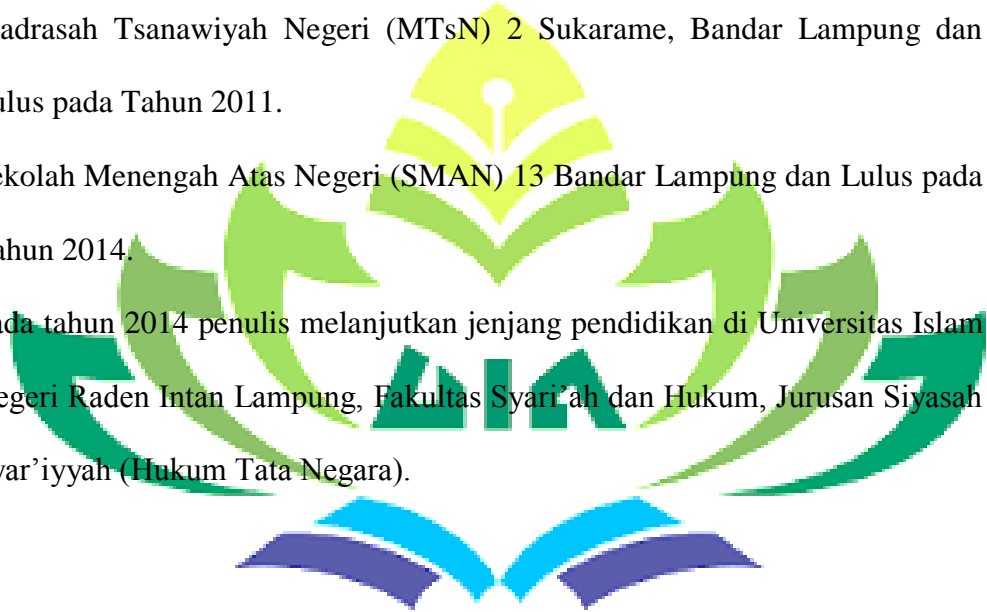


RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Faisal Abda'oe. Penulis dilahirkan di Pagelaran, pada tanggal 27 Maret 1996, anak pertama dari 2 (dua) bersaudara Wahyuni Annisa Fasha, putra dari pasangan Bapak Mahyudin dan Ibu Lela Hasni.

Riwayat Pendidikan penulis, yaitu:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Perumnas Way Kandis, Bandar Lampung dan Lulus pada Tahun 2008.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Sukarame, Bandar Lampung dan Lulus pada Tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Bandar Lampung dan Lulus pada Tahun 2014.
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyash Syar'iyah (Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta semesta alam yang telah memberikan nikmat pemahaman, kesehatan, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO. 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN DI INDONESIA” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan. Untuk ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., beserta staff dan jajaranya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., beserta staff dan jajaranya.

3. Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Ibu **Dr.** Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H., serta Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Bapak Frengki, M. Si.
4. Pembimbing I Drs. Ahmad Jalaluddin, SH., M.M. yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Pembimbing II Eko Hidayat, S.Sos., M.H. yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Syari'ah.
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institusi yang telah membantu memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Untuk Saudari Susanti, S.Pd yang selalu mendampingi, membantu, mendoakan, serta memotivasi guna terselesaikannya skripsi ini.
9. Teruntuk sahabat-sahabatku Anton Kurnia Mardiansyah S.H., Rendy Yusa Ambara S.H., Virgi Ernanda S.H., Hapid Black S.E., Alba Roma S.H., Teguh Hermawan S.H., Yan Patmawi S.H., Fitria Wulandari S.H., Fitri Apriyanti S.H., yang selama ini telah sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa penulis banggakan.

Penulis juga sadar bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas.

Tapi penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan kiranya dapat membantu penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini dan tak lupa penulis juga berharap para pembaca memberi masukan berupa saran sehingga penelitian ini akan lebih baik di masa mendatang

Bandar Lampung, 1 Mei 2019

Penulis,

FAISAL ABDA'OE
NPM. 1421020068



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam.....	15
2. Sumber Hukum Islam	19
3. Ruang Lingkup.....	36

B. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana	46
2. Pola Pembinaan Masyarakat	50
3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan.....	55
4. Tujuan Pembinaan.....	58
5. Tata Tertib Lapas dan Rutan Menurut Permenkumham Nomor 6 tahun 2013.....	60

6. Bentuk-bentuk Hukuman Disiplin Lapas dan Rutan	61
---	----

BAB III TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN

RUMAH TAHANAN DI INDONESIA

A. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan)	64
B. Pelaksanaan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013	68
1. Faktor-faktor yang menyebabkan Pelanggaran Tata Tertib.....	70
2. Upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan terhadap pelaksanaan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013.....	75

BAB IV ANALISIS

A. Pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan menurut Permenkumham No 6 Tahun 2013.....	80
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan di berikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Secara Komprehensif Terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Di Indonesia”**, berikut ini beberapa istilah atau kata-kata penting yang akan peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya.

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagai tinjauannya tepat, benar dengan dugaannya semula.²
2. **Hukum Islam** adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan-aturan dan larangan bagi umat muslim.³
3. **Komprehensif** adalah segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap meliputi seluruh aspek, atau meliputi ruang lingkup yang luas.⁴

²Petter Salim, M. A., Yunny Salim, B. Sc. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 722.

³Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, cet. Ke-4), hlm. 154.

⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

4. **Permenkumham No. 6 Tahun 2013** adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.⁵
5. **Tata Tertib** adalah Peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan; Disiplin.⁶
6. **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁷
7. **Rumah Tahanan** Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah Tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat dimengerti bahwa , Lapas dan Rutan memiliki pengertian yang berbeda walaupun dalam prinsipnya sama-sama Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana atau terpidana yang telah di tetapkan hukumannya (*inkracht*) belum memberikan efek jera bagi pelakunya. Sebagaimana kita ketahui adanya pemberitaan mengenai dugaan praktik Kasus Suap yang didalam sel tahanan ditemukan fasilitas sel mewah dan bebasnya narapidana keluar masuk sel tahanan. Hal ini jelas melanggar aturan dalam Permenkumham No.

⁵Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

⁶Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

⁷Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, *Op. Cit*, Pasal 1 ayat 1.

⁸Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, *Op. Cit*, Pasal 1 ayat 2.

6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia yang akan peneliti tinjau menurut Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademik, merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung.
2. Secara Teoritis, penelitian ini dapat berguna karena untuk menambah pengetahuan serta memperkaya hazanah keilmuan ilmu politik islam yang berhubungan dengan penyelenggaraan tata tertib di lapas.
3. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan berguna memberikan kontribusi pemikiran bagi para pihak untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kedisiplinan di lapas. sehingga amanah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia dapat berjalan secara maksimal. Sebab kedua aturan ini sangat berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain.

C. Latar Belakang Masalah

Penjara merupakan tempat penghukuman bagi pelaku kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penjara diciptakan oleh suatu negara sebagai lembaga yang mensosialisasikan para narapidana dan mereintegrasikan kedalam masyarakat. Penjara digunakan sebagai tempat penghukuman yang

umum terjadi di negara-negara pada era modern ini. Penjara adalah tempat dimana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Penjara umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang.

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjaraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 5 menyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁹

Penegakkan hukum sangat diperlukan untuk dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin warga binaan pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk

⁹Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 Tentang Pemasyarakatan.

memperbaiki dan mendidik warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap petugas pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib seperti yang telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Seruan berlaku adil dalam Al Quran sangatlah banyak, hal ini membuktikan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang menyerukan tentang pentingnya keadilan, dalam Surat An-Nisa ayat 58:



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q. S An-Nisa: 58).¹⁰

Selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 8:

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm. 128.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q. S Al-Maidah: 8).¹¹

Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak pada hari kiamat Allah SWT akan memberikan perlindungan kepada tujuh (golongan) orang. Salah satunya adalah seorang pemimpin yang adil sebagaimana dikisahkan dalam Hadits yang diriwayatkan Abi Hurairah r.a:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِلَّا مَامُ الْعَادِلِ وَشَابُ نَشَأٍ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبْنَاهُ امْرَأَةً ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَلِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ فِي : ١٠ كتاب الزكاة : ٣٦ بيا من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

Artinya: Abu Hurairah berkata “Nabi SAW bersabda: tujuh macam orang yang akan mendapat nauangan dari Allah pada saat tidak ada

¹¹Ibid, hlm. 159.

naungan kecuali naungan Allah: Imam (pemimpin) yang adil; pemuda yang rajin beribadah kepada Allah; Seorang yang hatinya selalu terpaut (ingat) masjid; Dua orang yang saling mencintai karena Allah baik ketika bertemu (berkumpul) atau berpisah; Seorang yang dirayu wanita bangsawan yang cantik untuk berzina, namun ia berkata: aku takut kepada Allah; Seorang yang bersedekah dengan Rahasia, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya; dan orang yang ingat kepada Allah ketika sendirian sampai bercucuran air matanya.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-10, Kitab Adzan bab ke-36, bab orang yang duduk di masjid, menunggu shalat dan keutamaan masjid).¹²

Wujud keadilan dalam sebuah negara adalah dibuatnya hukum untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Sasaran Hukum bukan hanya untuk orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi.¹³

Ada kemungkinan bahwa dalam praktiknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang dan Permenkumham tersebut baik yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan ataupun oknum-oknum Petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Syaripudin S Pane mantan narapidana di Rumah Tahanan Salemba sempat merekam kehidupan dan cerita dibalik Rutan dengan kamera video *handphone* miliknya Tahun 2008. Selama lima bulan pengusahaan ekspor impor itu mendekam di Rutan Salemba pada Tahun 2008, selama itu pula ia membuat 27 penggalan rekaman video durasinya mulai dari 1,5 menit sampai 3 menit. Dalam rekaman video Syaripudin diceritakan adanya praktik jual beli ruangan khusus untuk bercinta sampai kehidupan mewah di dalam blok

¹²Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Al-Lu’Lu’ Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*”, (Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 346.

¹³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 1.

rutan. Syaripudin diganjar hukuman penjara karena kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan staf perusahaannya. Ia ditahan Polresta Jakarta Pusat tanggal 11 November 2007 sampai Januari 2008. Pada 16 Januari, Syaripudin dikirim ke Rutan Salemba dengan status tahanan titipan kejaksaan. Selama mendekam di penjara, Syaripudin secara kebetulan menghuni Blok K yang merupakan blok khusus dihuni para napi korupsi. Menurut dia, Calon penghuni Blok K biasanya dipungut Rp 30 juta untuk menempati sebuah kamar dengan Fasilitas memadai, harga itu berlaku sampai dengan pembebasan “setiap bulan, penghuni wajib membayar uang kebersihan, keamanan, dan listrik sebesar Rp 1,25 juta,” katanya. Syaripudin menjelaskan, beberapa orang besar seperti Nurdin Halid pernah menghuni blok tersebut. Kondisi Blok ini sangat berbeda dengan Blok lain, disini tidak menggunakan pintu teralis. Pintu setiap ruangan baiknya sebuah pintu kayu rumah dan didalamnya terdapat fasilitas Ac, kulkas, dispenser, dan TV.¹⁴

Kepala Badan Narkotika (BNN) Komjen Budi Waseso mengungkapkan, pihaknya menemukan sel mewah ketika melakukan penggeledahan di sel yang ditempati oleh terpidana kasus narkoba, Haryanto Chandra alias Gombak. Penggeledahan dilakukan pada 31 mei 2017. Haryanto Chandra alias Gombak merupakan narapidana Lapas Cipinang kelas 1A yang divonis penjara selama 14 tahun. Dari penemuan sel mewah itu, penyidik BNN juga mendapati keberadaan beberapa barang seperti satu unit laptop, satu unit iPad, empat unit telpon genggam, dan satu unit token.

¹⁴Kompas. Com “Sel Mewah dihargai Rp 30 Juta”, (On-line), tersedia di: <https://search.kompas.com/search/?q=sel+dihargai+30+juta.html>, Hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 Pukul 14:22 WIB.

Dalam kesempatan yang sama, BNN juga menemukan aktifitas para narapidana yang tengah menghisap sabu didalam sel.¹⁵

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai tempat untuk menjalani hukuman pidana dan wadah untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan yakni narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi kesalahan. Karena bagaimanapun juga warga binaan adalah insan yang patut dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia walaupun mereka pernah melakukan kesalahan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Negara telah mengatur mengenai Kewajiban dan larangan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam Lapas maupun Rutan.

Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam praktek atau pelaksanaan terhadap Undang-Undang dan Permenkumham tersebut masih banyak terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperhatikan dan juga warga binaan pemasyarakatan yang kurang taat pada aturan maupun oknum-oknum yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun mengangkat kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Secara**

¹⁵Kompas. Com, “Kasus Lapas Mewah, Kepala dan KPLP Lapas Cipinang dicopot”
<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/10570411/kasus.lapas.mewah.kepala.dan.kp.lp.lapas.cipinang.dicopot.html>, Selasa Tanggal 15 Januari 2019 Pukul 15.30 WIB.

**Komprehensif Terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6
Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Di Indonesia.”**

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan Menurut Permenkumham No. 6 Tahun 2013 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pengadaaan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah di Indonesia

F. Metode Penelitian

Demi mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan dan penganalisaan data, penulis menggunakan metode penelitian, Metodologi penelitian merupakan aspek yang penting dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.. Metode penelitian menurut sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan untuk pengetahuan

tertentu¹⁶. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. Jenis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun rincian masing-masing sumber sebagai berikut :

¹⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif kualitatif dan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm .2.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14.

- a. Data primer disandarkan pada bahan-bahan yang mengikat data bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Al-hadits, Kitab-kitab Hukum, Undang-undang No.12 Tahun 1995 dan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia.
- b. Data sekunder merupakan sumber pendukung dari primer yang berasal dari jurnal, internet maupun data-data tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan. Maka metode Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*library research*) yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data informasi diperoleh berdasarkan bahan-bahan yang ada dipergustakaan, baik berupa arsip, dokumen, majalah, maupun lainnya.¹⁸

4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

¹⁸Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.37.

a. Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk kepentingan berikutnya.

b. Koding

Koding adalah usaha untuk membuat klasifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diproses untuk mengetahui, apakah data yang di peroleh sesuai atau tidak.¹⁹

c. Sistematisasi

Sistematisasi adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁰ Artinya mengelompokkan data secara sistematis yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klarifikasi masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif yaitu menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.²¹ Komparatif yaitu sebuah metode

¹⁹Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985) hlm. 29.

²⁰SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1985), hlm. 29.

²¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), hlm. 127.

perbandingan dengan cara menganalisa data-data yang ada, kemudian penulis kombinasikan untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang padu.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat

dalam al-Qur‘an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur‘an. Namun al-Qur‘an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur‘an itu mengandung norma hukum.²² Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.²³

Istilah Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata ‘hukum’ diartikan:

- a) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- b) Undang-undang, peraturan, dsb. Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- c) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan

²²Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

²³Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10.

d) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.²⁴

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.²⁵

Adapun kata yang kedua, yaitu Islam, oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik didunia maupun di akhirat kelak.²⁶

Gabungan dua kata tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan dan mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakatnya.

²⁴Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 410.

²⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia"*, (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996), hlm. 38.

²⁶Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidat Wa Syari'at*, (Kairo: Dar al-Qalam, Cet. III, 1996), hlm. 12.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum Islam telah mengatur segala perbuatan manusia serta peraturan-peraturan yang semuanya bersumber dari Al-Qur'an ataupun Hadis. Di dalam hal ini Hukum Islam juga mengatur tentang keadilan seorang pemimpin baik dalam membuat sebuah aturan ataupun dalam pelaksanaan aturan tersebut, hal ini tertuang dalam firman Allah SWT. di dalam Qur'an Surah Shaad ayat 26:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: *"Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". (Q.S. Shaad: 26).²⁷*

Dari ayat diatas Allah SWT. telah menyerukan pada setiap umatnya untuk senantiasa bersikap adil terhadap sesama. Dalam hal ini pemerintah selaku pembuat aturan diharapkan dapat berlaku adil dalam menjalankan tugasnya dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum dibanding kepentingan pribadi sehingga terciptanya kesejahteraan di dunia maupun akhirat.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm. 736.

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yakni sumber hukum Islam materil yakni sumber hukum yang bentuk hukum dalam sebuah negara dan sumber hukum formil yaitu sumber isi hukum yang menentukan corak isi hukum. Sumber hukum formil inilah yang kemudian disebut sebagai mashadir al-ahkam, sementara al-adillah asy-syar'iyah merupakan sumber hukum materil. Istilah mashadir al-ahkam sendiri tidak dikenal dalam catatan-catatan para ahli hukum masa klasik. Karena pada umumnya para ahli hukum klasik menggunakan istilah al-adillah asy-syar'iyah. Secara umum kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda antara satu sama lain. Mashadir berarti sumber, yakni wadah yang darinya digali norma-norma hukum tertentu, sedangkan al-adillah berarti dalil, yakni petunjuk yang akan membawa kepada hukum tertentu.²⁸

Sedangkan menurut al-Syatibi epistemologi hukum Islam pada hakekatnya mendasarkan seluruh teori usul fikihnya pada prinsip-prinsip induktif. Sebab al-Syatibi memulai dengan premis dasar bahwa prinsip-prinsip teori hukum dan sumber-sumber hukum yang berasal dari keotoritasan Tuhan sebagai dasar epistemologi sumber-sumber hukum.²⁹

Adapun sumber-sumber Hukum Islam antara lain:

²⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 82.

²⁹M. Soleh Bajuri, "Menggagas Paradigma *Ushul Al-Fiqh* Alternatif Dan Pengembangan studi Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah* Vol. X, No. 4 Juli 2012, (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, 2012), hlm. 460. (On-line), tersedia di: <http://www.ejournal.ac.id/index.php/adalah.html>. (13 Maret 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

a. *Al Qur'an*

Merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam, yang dibenarkan oleh penelitian ilmiah terakhir (Maurice Bucaille, 1979: 185), al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.³⁰

Untuk definisi Alquran, meskipun berbagai kalangan memberikan definisi yang berbeda-beda, namun tidak memiliki perbedaan yang begitu berarti. Secara bahasa Qur'an berasal dari kata *Qira'ah*, yakni masdar dari kata *qara'a*, *qira'atan*, *qur'an*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al Qiyamah:17-18

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ ﴿١٧﴾

Artinya; "Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu". (QS. al Qiyamah:17-18).

³⁰ Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia" Edisi Ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 72.

Adapun secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama Alquran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam mushhaf, diriwayatkan secara mutawatir, yang membacanyanya dinilai ibadah, diawali dengan surat al Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.³¹

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- 1) Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- 2) Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- 3) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- 4) Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

Isi Kandungan Al-Qur'an dari dua segi yaitu:

- 1) Segi Kuantitas

Al Qur'an terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa

- 2) Segi Kualitas

Isi pokok Al Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- a) Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal – hal lain

³¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, terj. Muhammad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm. 3.

yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.

- b) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.
- c) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku – perilaku tercela.

b. *As Sunnah (Al-Hadits)*

sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-Qur'an.³²

Sunnah yang merupakan kata bahasa Arab berakar dari kata kerja *sanna-yasunnu-sunnatan*, yang berarti jalan yang sering dilalui, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti sunnah ini secara bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan.³³

Makna sunnah dalam bentuk yang asli inilah yang selalu dipahami kaum Muslimin secara konseptual dan teori. Tetapi bagi para Muhaddisin, sunnah Nabi dipahami sebagai segala informasi "verbal" mengenai diri Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, sifat-sifat

³²Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm, 88.

³³Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, hlm. 55.

alamiah (khalqiyah) dan etik (khulqiyah), baik yang terjadi sesudah (telah diangkat menjadi Nabi), atau sebelumnya.

Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang sunnah, maka ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah lain yang memiliki kemiripan dengan istilah sunnah, agar dapat terlihat perbedaan diantaranya, meskipun hal tersebut sebenarnya berbeda.

1) Khabar

Khabar menurut bahasa berarti an-Naba' (berita). Yaitu segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut terminologi khabar lebih bersifat umum dibanding Hadis, yakni sesuatu yang datang dari Nabi saw atau orang selain Nabi.³⁴ Ulama lain mengatakan bahwa khabar adalah suatu berita yang datang dari selain Nabi, sedangkan Hadis adalah berita yang bersumber dari Nabi.³⁵

2) Atsar

Secara bahasa, atsar sama artinya dengan khabar. Secara istilah Atsar merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan.³⁶ Ulama Khurasan berpendapat bahwa atsar dipakai untuk yang mauquf dan khabar untuk yang marfu'.³⁷

³⁴Abdullah Ahmad An-Naim, Dekonstruksi Syari'ah, terj. Ahmad Suedy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 20.

³⁵Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1998), hlm. 11.

³⁶Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis, hlm. 32.

³⁷Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis, hlm.11.

3) Sanad

Sanad menurut bahasa berarti mu'tamad, yaitu tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya. Dikatakan demikian, karena Hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama.³⁸ Yang dimaksud dengan silsilah adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi Hadis tersebut, mulai dari yang pertama sampai kepada Nabi SAW.³⁹

4) Matan

Matan menurut bahasa adalah sesuatu yang keras dan tinggi (terangkat) dari bumi. Sedangkan secara istilah, matan berarti lafaz-lafaz Hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu.⁴⁰ Dengan demikian matan adalah lafaz Hadis itu sendiri.

5) Rawi

Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang memberikan Hadis. Defenisi lain mengatakan, bahwa rawi adalah orang yang menerima Hadis kemudian menghimpunnya dalam satu kitab tadwin. Seorang rawi dapat juga disebut sebagai mudawwin, yaitu orang yang membukukan Hadis.

³⁸Mahmud at-Thahhan, Taisir Musth.ah al-Hadis (Beirut: Dar Alquranul Karim, 1979), hlm. 16.

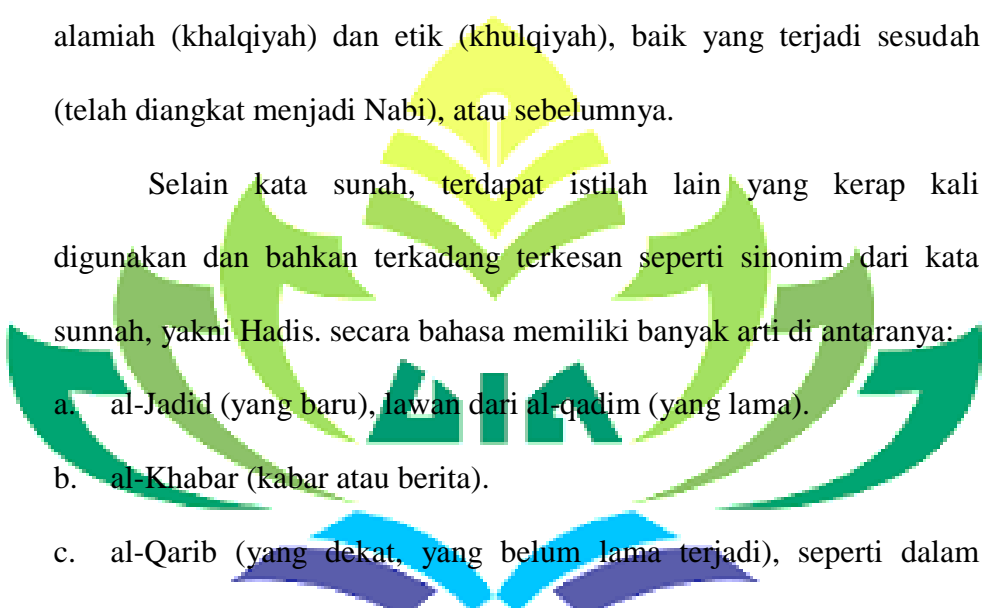
³⁹Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis, hlm. 92.

⁴⁰Daud Rasyid, Pembaharun Islam dan Orientalisme dalam Sorotan (Jakarta : Media Eka Sarana, 2002), hlm. 147.

Sunnah yang merupakan kata bahasa Arab berakar dari kata kerja sanna-yasunnu-sunnatan,⁴¹ yang berarti jalan yang sering dilalui, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti sunnah ini secara bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan.⁴²

Makna sunnah dalam bentuk yang asli inilah yang selalu dipahami kaum Muslimin secara konseptual dan teori. Tetapi bagi para Muhaddisin, “sunnah Nabi” dipahami sebagai segala informasi “verbal” mengenai diri Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, sifat-sifat alamiah (khalqiyah) dan etik (khulqiyah), baik yang terjadi sesudah (telah diangkat menjadi Nabi), atau sebelumnya.

Selain kata sunah, terdapat istilah lain yang kerap kali digunakan dan bahkan terkadang terkesan seperti sinonim dari kata sunnah, yakni Hadis. secara bahasa memiliki banyak arti di antaranya:

- 
- a. al-Jadid (yang baru), lawan dari al-qadim (yang lama).
 - b. al-Khabar (kabar atau berita).
 - c. al-Qarib (yang dekat, yang belum lama terjadi), seperti dalam perkataan “hadisul ahli bil Islam” orang yang baru memeluk agama Islam.

Namun tidak selamanya apa yang dikatakan Hadis hanyalah yang melengkapi perbuatan-perbuatan pada Rasul semata. Kalangan ulama seperti at-Tibby berpendapat bahwa, Hadis itu melengkapi sabda Nabi, perbuatan dan taqrir beliau, melengkapi perbuatan-perbuatan

⁴¹Munawwwir, Kamus Arab-Indonesia.

⁴²Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam, hlm. 55.

sahabat Nabi, sebagaimana pula melengkapi perkataan, perbuatan al-
tabiin disebut juga dengan Hadis. Sebagai bukti telah dikenal dengan
istilah Hadis marfu, mawquf, dan maqtu.⁴³

Sebagian ulama berpendapat bahwa kata Hadis dan sunnah
memiliki pengertian yang sama, yaitu sama-sama segala berita yang
bersumber dari Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun
taqrir Nabi. Pendapat lain mengatakan bahwa pemakaian kata Hadis
berbeda dengan sunnah. Kata Hadis dipakai untuk menunjukkan segala
berita dari Nabi secara umum. Sedang kata sunnah dipakai untuk
menyatakan berita yang bersumber dari Nabi yang berkenaan dengan
hukum syara. Atau dengan kata lain sunnah lebih kepada hasil deduksi
hukum yang bersumber dari Hadis. Jadi Hadis adalah media pembawa
sunnah. Klaim ini dapat.⁴⁴

c. *Ijtihad*

Ijtihad adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk
berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya
memahami kaidah-kaidah hukum yang *fundamental* yang terdapat
dalam al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang

⁴³ Hadis marfu':Berita yang hanya disandarkan kepada Nabi saja baik yang disandarkan itu perkataan, perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus; Hadis Mawquf: berita yang hanya disandarkan kepada Shahabat saja baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung atau terputus; Hadis maq'u': berita yang hanya disandarkan kepada al-tabi'in saja baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung atau terputus.

⁴⁴ Kamali, Prinsip h. 60.

terdapat dalam Sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.⁴⁵

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Diantara metode atau cara berijtihad adalah:

1) *Ijmak*

Ijmak adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Seperti yang disinggung sebelumnya, adalah mengherankan untuk memasukkan *ijmak* ke dalam sumber hukum. Karena *ijmak* sebagaimana yang dipahami dalam literatur-literatur filsafat hukum Islam hanyalah metode dalam mengambil keputusan hukum. Akan tetapi posisi *ijmak* sebagai sumber hukum menjadi jelas seperti yang dikemukakan oleh Ahmad an-Naim.

Pengertian *ijmak* sebagai sumber hukum harus dipahami dari konsep awal *ijmak* tersebut. Ketika sunnah dikonotasikan dengan sunnah Nabi, maka tradisi hidup sahabat dan beberapa generasi setelahnya diturunkan derajatnya sebagai sumber hukum Islam yakni sebagai sumber ketiga. Semuanya diakumulasi dalam *ijmak*.

Meskipun *ijmak* telah diterima sebagai sumber hukum Islam sejak masa dini, akan tetapi masih banyak perdebatan di

⁴⁵Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 101.

dalamnya, baik terkait definisi, cakupan dan batasan. Kontroversi ini merupakan akibat dari tidak memadainya perangkat metodologi yang mengantarkan ummat Islam kepada ijmak ke berbagai masalah. Kritiik modern terhadap ijmak menyatakan bahwa definisi ijmak telah gagal untuk menjadi jalan keluar untuk berbagai persoalan karena terlalu lamban. Kritik awal ijmak diajukan oleh ad-Dahlaw yang berpendapat ijmak seharusnya merupakan relativitas. Dengan kata lain ijmak bukanlah konsensus bersama tapi hanya berupa kesepakatan orang atau institusi yang berwenang di sebuah tempat saja. Iqbal juga berpendapat bahwa sungguh mengherankan kenapa ijmak ini tidak menjadi otoritas sebuah institusi yang mapan.

Apakah ijmak harus bersyarat kesepakatan bulat adalah masalah yang sungguh berat yang dihadapi ijmak dengan definisi yang beredar sekarang. Banyak alasan untuk menyatakan bahwa ijmak tidak akan pernah tercapai dan bahkan tidak perlu ada. Para mujtahid cukup untuk mengkaji sumber-sumber hukum dengan metode lain yang layak.

Gagasan ijmak ini muncul dari konsep persatuan masyarakat Arab dalam masalah politik Lebih dasar lagi, bahkan dasar ijmak tidak bisa dibuktikan dengan jelas dan kuat. Semua dalil-dalil ijmak lebih condong kepada perpaduan dan kesatuan ummat bukan dalam masalah memutuskan hukum. Selain itu

ternyata tidak ada definisi yang jelas tentang konsep *ijmak*, *ummat* dan *jama'ah* pada masa awal.

Bila *ijmak* didefinisikan sebagai kesepakatan bulat mujtahid muslim dari suatu priode setelah wafatnya Muhammad, maka tidak ada alasan yang tepat untuk memasukkannya sebagai sumber hukum, ia lebih kepada metode pengambilan hukum.

Meskipun banyak persoalan yang menyoal *ijmak*, sumbangannya terhadap perkembangan hukum Islam sungguh besar. Ia tidak hanya dianggap sebagai sumber hukum akan tetapi juga sebagai dalil intrepretasi

2) *Qiyas*

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau al-Hadits dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadis) karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya). *Qiyas* adalah ukuran.

Sumber yang sering ditempatkan sebagai sumber ke-empat adalah *Qiyas*. *Qiyas* merupakan perluasan dari hukum yang ada. *Qiyas* merupakan wadah bagi akal dalam sebagai peran dalam pengambilan hukum. *Qiyas* ini pada mulanya merupakan ikatan dan batasan terhadap penggunaan *ra'yu* yang telah marak hingga zaman Syafi'i. Dengan tujuan menyandarkan hukum kepada Alquran maupun sunnah, maka *qiyas* inipun diatur dalam sistem

metode pengambilan hukum. Ijmak dan qiyas merupakan sumber hukum yang disepakati pada abad ke-2 dan 3 H.

Seperti disinggung sebelumnya, apakah qiyas memang sumber hukum ataukah metode adalah permasalahan yang jarang dikaji. Banyak literatur filsafat hukum Islam hanya menyebutnya sebagai sumber, ada juga yang menyatakannya sebagai teknik, tapi mengkajinya dalam bab yang sama dengan sumber hukum.

Penulis tidak meragukan bahwa qiyas adalah metode pengambilan hukum. Qiyas ini baru bisa menjadi sumber hukum bila yang dimaksud adalah hasil deduksi dari qiyas tersebut. Akan tetapi itu tidak mungkin. Seorang mujtahid tidak bisa mengambil hukum baru dari hasil deduksi qiyas, ia harus berqiyas kembali dari Alquran atau Sunnah

3) *Istidlal*

Istidlal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam.

4) *Masalih al-mursalah*

Masalih al-mursalah atau disebut juga *maslahat mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik didalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

Dari segi bahasa, kata Al-Maslahah adalah seperti lafazh almanfa'at, baik artinya ataupun wajah-nya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-Shalah, seperti halnya lafazh al-manfa'at sama artinya dengan al'naf'u. Secara terminologi, maslahah diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan/kemadharatan.

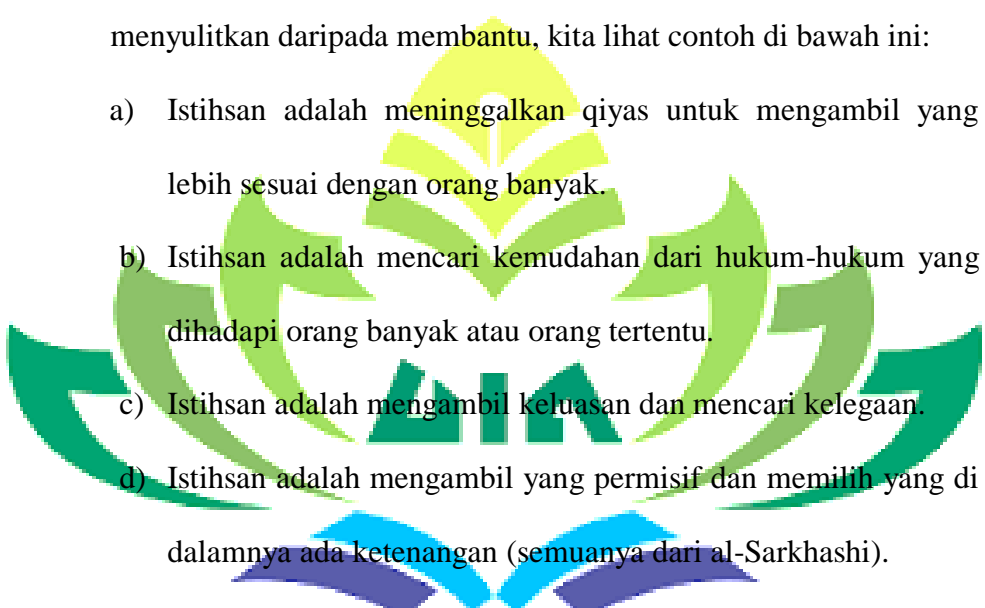
Sedangkan maslahah mursalah menurut Ulama² Ushul adalah: Menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan nash, dan ijma', berlandaskan pada pemeliharaan maslahat mursalah, yaitu maslahat yang tak ada dalil syara' yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya. Sebagian Ulama² Ushul menamakannya istishlah (Hanbaliyah) dan sebagian lagi menyebutkan „berbuat atas dasar maslahat mursalah (Malikiyah)

5) *Istihsan*

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Secara denotatif, istihsan artinya memandang baik terhadap sesuatu. Pendirian Dewan Madzolim dipandang baik: artinya, harus dilakukan berdasarkan istihsan. Menarik sekali, para ulama yang mempertahankan istihsan mengambil dalil dari Alquran dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif ini (yaitu, orang-orang yang mendengarkan

kata dan diturutinya yang paling baik, QS. al-Zumar: 18 dan turutlah (pimpinan) yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, al-Zumar: 55.

Bila kita mengacu pada literatur, kita akan menemukan banyak sekali definisi istihsan, yang tidak selalu menunjukkan referensi yang sama. Ada definisi yang dibuat dengan memperhatikan segi-segi politis dan bukan segi-segi ilmiahnya. Untuk menunjukkan bagaimana definisi-definisi itu lebih banyak menyulitkan daripada membantu, kita lihat contoh di bawah ini:

- 
- a) Istihsan adalah meninggalkan qiyas untuk mengambil yang lebih sesuai dengan orang banyak.
 - b) Istihsan adalah mencari kemudahan dari hukum-hukum yang dihadapi orang banyak atau orang tertentu.
 - c) Istihsan adalah mengambil keluasan dan mencari kelegaan.
 - d) Istihsan adalah mengambil yang permisif dan memilih yang di dalamnya ada ketenangan (semuanya dari al-Sarkhashi).
 - e) Istihsan artinya meninggalkan kepastian qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau mentakhshiskan qiyas dengan dalil yang lebih kuat (al-Bazdawi dari madzhab Hanafi).
 - f) Istihsan artinya mengamalkan yang lebih kuat di antara dua dalil (al-Syathibi dari madzhab Maliki).

- g) Istihsan artinya meninggalkan hukum masalah dari yang semacamnya karena dalil syara' yang tertentu (al-Thufi dari madzhab Hambali).
- h) Istihsan adalah apa yang dipandang baik oleh mujtahid dengan akalanya.

Karena kita mengalami kesulitan memahami istihsan dari berbagai definisi itu, marilah kita ambil contoh kasus yang oleh para mujtahid disebut sebagai istihsan. Melihat aurat perempuan yang bukan muhrim haram, karena dapat menimbulkan “fitnah” (membawa orang kepada kemaksiatan). Yang dalam kurung itu disebut 'illat yang sangat jelas (kita sekarang sedang melakukan qiyas jaliy). Bagaimana hukumnya seorang dokter yang harus memeriksa pasien wanitanya? Bila ia tidak melihat auratnya, ia tak bisa menolong pasien itu dengan baik. Ia harus menolong pasien itu untuk mengembalikan kesehatannya, untuk kemaslahatan pasiennya. Tapi alasan ('illat) ini hanya dalam kasus pasien saja dan dianggap tegas (kita sedang melakukan qiyas khafiy). Bila kita meninggalkan qiyas jaliy dan mengambil qiyas khafiy, kita melakukan istihsan.

Seorang mujtahid meninggalkan qiyas karena menemukan hadits yang lebih kuat, atau karena memperhatikan kemaslahatan, atau karena 'urf (adat kebiasaan yang sudah lazim). Bila kita

memperhatikan praktek-praktek yang disebut istihsan, kita menemukan istihsan dalam tiga pengertian:

Pertama, istihsan berarti memilih yang lebih kuat di antara dua dalil yang bertentangan atau berbeda (berikhtilaf). Boleh jadi ikhtilaf di antara dua dalil lafzhi yakni dalil yang diambil dari Alquran dan Sunnah. Atau ikhtilaf di antara dua dalil ghair lafzhi: misalnya, antara qiyas jaliy dengan qiyas khafiy. Atau ikhtilaf di antara dalil lafzhi dan ghair lafzhi.

Kedua, istihsan berarti mengambil sesuatu yang sudah dipandang baik oleh 'urf atau akal. Misalnya, mencatat pernikahan di kantor departemen Agama. Istihsan dalam arti ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena apa yang dipandang baik 'urf atau akal itu boleh jadi sangat subyektif, sehingga besar kemungkinan mengikuti bias-bias sosio-psikologis. Kita juga tidak cukup waktu membicarakan hal ini.

Ketiga, istihsan berarti meninggalkan dalil-dalil tertentu untuk mendatangkan maslahat atau menegakkan hukum di atas pertimbangan maslahat yang lima: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Istihsan jenis terakhir ini disebut juga istishan atau al-mashalih al-mursalah.

6) *Istishab*

Istishab ialah menjadikan lestari keadaan sesuatu yang sudah di tetapkan pada masa lalu sebelum ada dalil yang mengubahnya.

Jadi, apabila sudah ditetapkan suatu perkara pada sesuatu waktu maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya, sebaliknya apabila sesuatu perkara telah ditolak pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menerima (mentasbithkan) perkara itu. Menurut istilah Ulama⁴⁶ Ushul, ialah penetapan terhadap sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. Atau menetapkan hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan.

Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

7) *Urf*

Urf atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.⁴⁶

Dari segi bahasa (etimologi), *urf* merupakan isim masdar dari fiil madli yang berarti “kenal”. Dari kata ini muncul kata ma⁴⁶rifah (yang dikenal atau pengetahuan), ta⁴⁶rif (definisi), ma⁴⁶ruf

⁴⁶*Ibid*, hlm. 108.

(yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata urf (kebiasaan yang baik).

Arti urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, urf sering disebut adat. Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Urf adalah kebiasaan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat secara turun menurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus. Urf perbuatan misalnya, akad jual beli cukup dengan barter (mu'athah) tanpa persetujuan jual beli secara tertulis atau lisan (shighah lafdhiyyah).

3. Ruang Lingkup

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia,

hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (hablun minallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

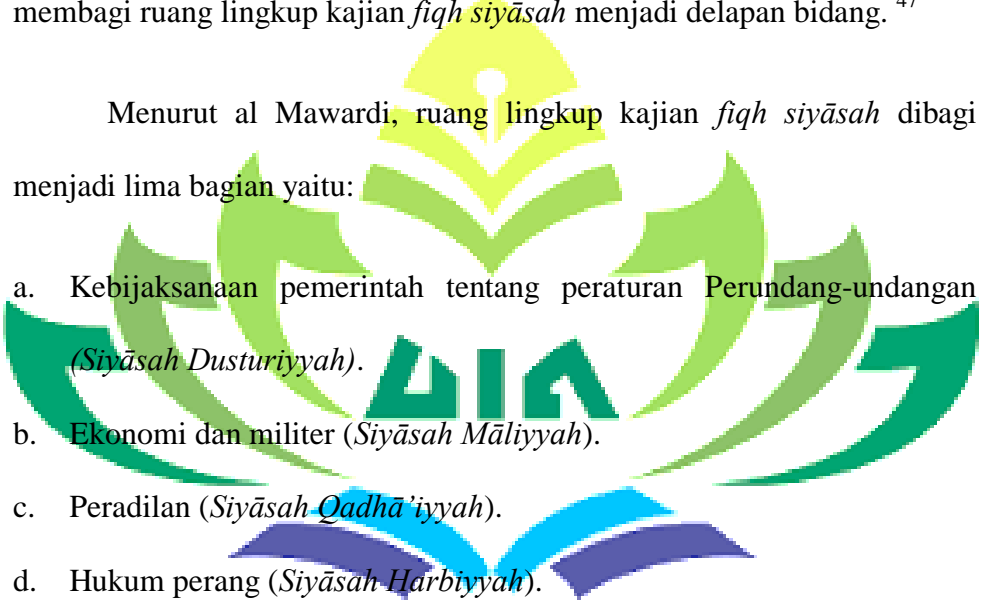
Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam alQuran, Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum i'tiqadiyyah (keimanan), hukum khuluqiyyah (akhlak), dan hukum 'amaliyyah (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum 'amaliyyah inilah yang identik dengan hukum Islam yang

dimaksud di sini. Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum-hukum 'amaliyyah menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau bidang-bidang kajian hukum Islam ada dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Kedua bidang hukum ini akan diuraikan lebih jauh pada pembahasan selanjutnya.

Bagian pertama mencakup antara lain peraturan-peraturan tentang shalat, puasa, zakat dan haji. Adapun bagian kedua dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian. Yang terpenting diantaranya adalah mu'amalah (secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian dan utang piutang), *jinayah* (pidana) dan *munakahat* (hukum perkawinan). Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. menetapkan lima bidang, empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang.⁴⁷

Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* dibagi menjadi lima bagian yaitu:

- 
- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan Perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
 - b. Ekonomi dan militer (*Siyāsah Mālīyyah*).
 - c. Peradilan (*Siyāsah Qadhā'īyyah*).
 - d. Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
 - e. Administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah*).⁴⁸

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan (*Siyāsah Qadhā'īyyah*).
- b. Administrasi Negara (*Siyāsah Idariyyah*).

⁴⁷Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 9.

⁴⁸Al-Mawardi, "*al-Ahkam al-Sulthaniyyah*", (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp).

- c. Moneter dan militer (*Siyāsah Māliyyah*).
- d. Hubungan internasional (*Siyasah dauliyyah/Siyasah kharijiyyah*).⁴⁹

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional.
- c. Keuangan Negara.⁵⁰

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyāsah Dusturiyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyāsah Tasyri’iyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyāsah Qada’iyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyāsah Māliyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyāsah Idariyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyāsah Dauliyyah atau Siyāsah Kharijiyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar’iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syar’iyyah* (politik peperangan).⁵¹

⁴⁹Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 14.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 14.

⁵¹Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, hlm. 15.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:⁵²

- a. Politik Perundang-Undangan (*al-Siyāsah al-Dusturiyah*) Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
 - b. Politik Luar Negeri (*al-Siyāsah al-Kharijah*) Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyāsah al-Du'ali al-Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - c. Politik Keuangan dan Moneter (*al-Siyāsah al-Māliyah*) Permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah māliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dapat dikaji dari pendekatan *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Perundang-undangan) yang sesuai dengan penjelasan Fiqih Siyasah diatas.

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah Perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di

⁵²Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, hlm. 16.

samping itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah Undang-undang dasar negara.⁵³

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanda membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁵⁴

⁵³ Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, hlm. 177.

⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar. 1997), hlm. 25.

B. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara.

Kata Lembaga Pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963 dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Istilah Pemasyarakatan dikemukakan oleh seorang ahli hukum yang bernama Sahardjo pada saat beliau berpidato ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau mengatakan: tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan anak didik adalah *Gestichten Reglement* (Reglemen Kopenjaraan) STB 1917 Nomor 708 dan

kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁵⁵

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) dan juga merupakan himpunan dari Norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana.⁵⁶

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani

⁵⁵C. Djisman Samosir, *"Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan"*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 128.

⁵⁶Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum, *"Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan Dibeberapa Negara"*, (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2016), hlm. 41.

para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu agar mereka menjadi warga yang baik kemudian hari.⁵⁷

Sedangkan Rumah Tahanan atau dikenal dengan istilah Rutan dalam pandangan awam, lembaga ini kerap sulit dibedakan dengan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas, sebagaimana pandangan masyarakat yang kerap keliru dalam membedakan lembaga penahanan dan penjara atau tahanan dan narapidana. Hal ini menjadi wajar mengingat dalam praktiknya tidak jarang seorang narapidana ditempatkan dalam Rutan atau sebaliknya tahanan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁸

Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya dan yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa sedangkan waktu atau lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.⁵⁹

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi Rutan terkait dengan bekerjanya sistem peradilan pidana adalah pada masa penyidikan/penuntutan dan pengadilan. Dalam proses ini jelas bahwa asas praduga tak bersalah masih

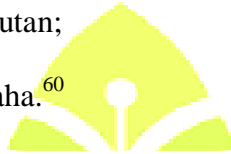
⁵⁷C. Djisman Samosir, *Op. Cit.* Hlm. 128.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 65.

⁵⁹Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum, *Op. Cit*, hlm. 42.

diperhatikan sebagai bagian terpenting dalam memperlakukan para tahanan. Oleh karena itu, seharusnya fungsi Rutan berbeda karena sekedar sebagai tempat penahanan dan bukan tempat orang menjalankan pidana. Rutan memiliki tugas merawat, membimbing, membina tersangka atau mereka yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tugas Rutan ialah:

1. Melakukan pelayanan tahanan;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
3. Melakukan pengelolaan Rutan;
4. Melakukan urusan tata usaha.⁶⁰



Dewasa ini, pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan memperbaiki penjahat dan sistem pemidanaan yang berjalan ke arah yang lebih rasional. Sebab-sebab perubahan itu ialah perkembangan ekonomi dan perkembangan ke arah yang manusiawi, begitu pula timbulnya konsep-konsep baru mengenai hakikat manusia dan masyarakat. Walaupun sekarang dikatakan sistem pemidanaan menuju ke arah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin disingkirkan. Lagipula belum terbukti sistem mana yang lebih baik untuk memperbaiki atau rehabilitasi penjahat.⁶¹

⁶⁰Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *Op. Cit*, hlm. 68-69.

⁶¹Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum, *Op. Cit*, hlm. 43.

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tidak terbatas bagi masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik, akan tetapi meliputi seluruh lapisan masyarakat termasuk para narapidana. Narapidana sebagai bagian dari warga negara pantas dihargai dan berhak mendapat tempat dalam pergaulan sosial sesuai dengan hakekat dan martabatnya.⁶²

Pasal 1 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

- a. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang diatas terdiri dari Anak pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil:
 - 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di

⁶²C. Djisman Samosir, "Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan", (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 156.

LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.⁶³

Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dicatat yang terdiri atas:

- a. Putusan pengadilan.
- b. Jati diri.
- c. Barang dan uang yang dibawa.
- d. Pemeriksaan kesehatan.
- e. Pembuatan Pasphoto.
- f. Pengambilan sidik jari.
- g. Pembuatan berita acara serah terima terpidana.⁶⁴

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian juga halnya para warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai

⁶³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1.

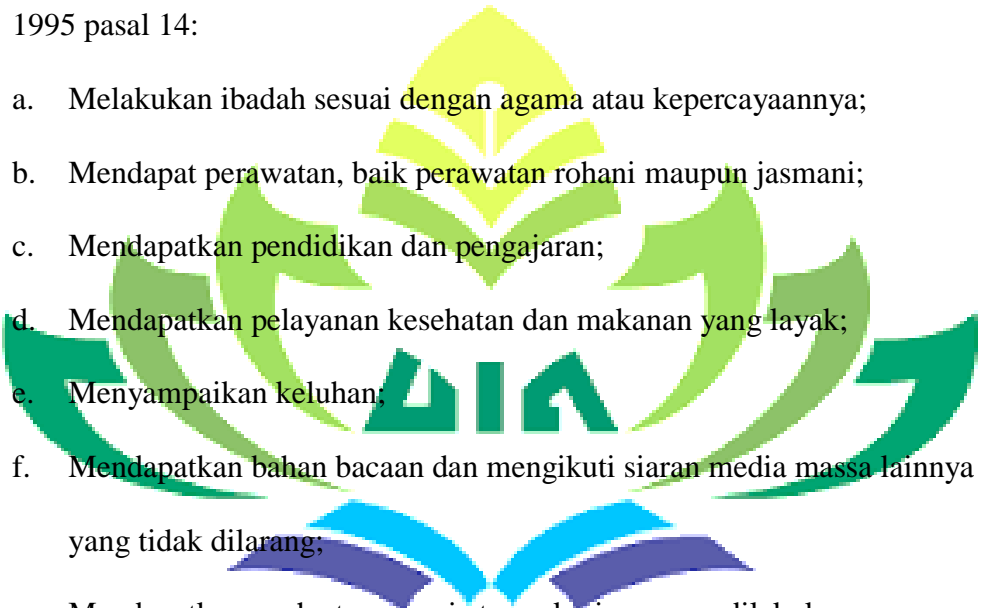
⁶⁴*Ibid*, Pasal 10.

musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana. Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. 27 Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bentuk apapun atau pemenjaraan (body of principle for the protection of all persons under any form detention of imprisonment) yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 9 desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran

terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Tidak seorang pun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Hak-hak Warga Binaan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14:

- 
- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga binaan yaitu bahwa setiap narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kewajiban warga binaan ditetapkan pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

- a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pola Pembinaan Masyarakat

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat

⁶⁵C. Djisman Samosir, *Op. Cit*, hlm. 132.

mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat wargabinaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

e. Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

f. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatn dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

1) Tahap Pertama

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab- sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. 14 Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (maksimum security).

2) Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium-security.

3) Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain: a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium-security. b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam

tahap lanjutan ini 15 Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.

4) Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan

3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan

Proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

a. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan ”angker” dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

b. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

c. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang

dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.⁶⁶

Adapun sarana dan prasarana yang harus ada di Rumah Tahanan (Rutan), maka dipersyaratkan standar minimal yang harus ada, sebagai berikut:

- a. Ruang tahanan/kamar tahanan/sel tahanan;
- b. MCK (Mandi, Cuci, Kakus);
- c. Ruang pertemuan;
- d. Ruang pembinaan;
- e. Ruang kunjungan;
- f. Ruang makan;
- g. Ruang jaga;
- h. Ruang perkantoran;
- i. Ruang ibadah;
- j. Poliklinik;
- k. Kelengkapan rutan; dan
- l. Sarana angkutan tahanan (kendaraan tahanan).⁶⁷

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-petugas tersebut melakukan peranan sesuai dengan

⁶⁶A Budiarsyah, *Tinjauan Pustaka*, (On-line), Tersedia di <http://www.digilib.unila.ac.id.html>. Minggu 3 Februari 2019 Pukul 20.40 WIB.

⁶⁷Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *"Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan"*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 73.

kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan “proses pemasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

4. Tujuan Pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikan, agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat, agar para narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani hukuman. Masyarakat sebaiknya menerima narapidana, setelah selesai menjalani masa pidananya.⁶⁸

Tujuan Pembinaan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 2 yaitu:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam Rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

⁶⁸C. Djisman Samosir, “*Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*”, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 142.

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶⁹

Berbicara tentang pembinaan narapidana di Indonesia, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari mekanisme pembangunan serta kondisi dan pola pikir masyarakat. Harus diingat disatu pihak pemerintah melalui Lembaga Pemasyarakatan berusaha membina narapidana, akan tetapi di lain pihak ditemukan juga masyarakat yang tidak mau menerima narapidana dan ada juga masyarakat yang curiga terhadap narapidana setelah narapidana itu selesai menjalani masa pidananya.

Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam usaha mengembalikan narapidana ke jalan yang benar, sebab bagaimanapun harus diakui bahwa narapidana itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian tanggung jawab masyarakat untuk membantu pemerintah menanggulangi pembinaan narapidana mutlak diperlukan, agar proses pembinaan itu berjalan lancar, dengan tetap

⁶⁹Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Op. Cit*, Pasal 2.

memperhatikan berbagai faktor yang ada kaitannya dengan narapidana tersebut, misal pendidikannya.⁷⁰

5. Tata Tertib Lapas dan Rutan Menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013

Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana termuat di dalam pasal 3 dan pasal 4 tentang kewajiban dan larangan bagi Narapidana.

Pasal 3 Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:⁷¹

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Pasal 4 Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:⁷²

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;

⁷⁰C. Djisman Samosir, *Op. Cit*, hlm. 143.

⁷¹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 3.

⁷²*Ibid*, Pasal 4.

- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

6. Bentuk-bentuk Hukuman Disiplin Lapas dan Rutan

Di dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 8, 9, dan 10 mengatur bentuk-bentuk hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib.

Pasal 8 Narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi: ⁷³

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang; atau

⁷³*Ibid*, Pasal 8, 9, 10.

- c. Hukuman disiplin tingkat berat;

Pasal 9 Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi: memberikan peringatan secara lisan; dan memberikan peringatan secara tertulis.
- b. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- c. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- d. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
- e. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Pasal 10 Ayat(1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:

- a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
- c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
- e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
- f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.

Pasal 10 Ayat(2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:

- a. Steril Area tanpa izin petugas;
- b. Memasuki membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
- c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
- d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
- e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;

- f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.

Pasal 10 Ayat(3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
- c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. Menyebarkan ajaran sesat;
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

BAB III

TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN DI INDONESIA

A. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Jumlah Lapas yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 258 Lapas.

Berikut ini adalah uraian jumlah dan jenis Lapas di Indonesia:

Jumlah Dan Jenis Lapas di Indonesia⁷⁴

Tabel 3.1

Jenis Lapas	Jumlah
Lembaga Pemasyarakatan (Umum)	200
Lapas Narkotika	23
Lapas Pemuda	2
Lapas Terbuka	7
Lapas Wanita	10
Lapas Khusus Anak	16
Total	258

Kepala Badan Narkotika (BNN) Komjen Budi Waseso mengungkapkan, pihaknya menemukan sel mewah ketika melakukan penggeledahan di sel yang ditempati oleh terpidana kasus narkoba, Haryanto

⁷⁴Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 83.

Chandra alias Gombak. Penggeledahan dilakukan pada 31 mei 2017. Haryanto Chandra alias Gombak merupakan narapidana Lapas Cipinang kelas 1A yang divonis penjara selama 14 tahun. Dari penemuan sel mewah itu, penyidik BNN juga mendapati keberadaan beberapa barang seperti satu unit laptop, satu unit iPad, empat unit telpon genggam, dan satu unit token. Dalam kesempatan yang sama, BNN juga menemukan aktifitas para narapidana yang tengah menghisap sabu didalam sel.

Jumlah Rutan yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 173 Rutan. Berikut persebaran jumlah Rutan yang ada di Indonesia.

Persebaran jumlah Rutan di Indonesia⁷⁵

Tabel 3.2

No	Provinsi	Jumlah
1	Bali	4
2	Bangka Belitung	1
3	Banten	4
4	Bengkulu	1
5	Yogyakarta	4
6	Jakarta	3
7	Gorontalo	-
8	Jambi	1
9	Jawa Barat	4

⁷⁵Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *Op. Cit*, hlm. 70.

10	Jawa Tengah	20
11	Jawa Timur	14
12	Kalimantan Barat	7
13	Kalimantan Selatan	6
14	Kalimantan Tengah	4
15	Kalimantan Timur	4
16	Kepulauan Riau	4
17	Lampung	6
18	Maluku	10
19	Maluku Utara	3
20	Aceh	15
21	Nusa Tenggara Barat	3
22	Nusa Tenggara Timur	8
23	Papua	1
24	Papua Barat	3
25	Riau	7
26	Sulawesi Barat	4
27	Sulawesi Selatan	15
28	Sulawesi Tengah	6
29	Sulawesi Tenggara	4
30	Sulawesi Utara	7
Total		173

Sumber: *smslap.ditjenpas.go.id* dikutip kembali oleh penulis 23 september 2019.

Syaripudin S Pane mantan narapidana di Rumah Tahanan Salemba sempat merekam kehidupan dan cerita dibalik Rutan dengan kamera video *handphone* miliknya Tahun 2008. Selama lima bulan pengusahaan ekspor impor itu mendekam di Rutan Salemba pada Tahun 2008, selama itu pula ia membuat 27 penggalan rekaman video durasinya mulai dari 1,5 menit sampai 3 menit. Dalam rekaman video Syaripudin diceritakan adanya praktik jual beli ruangan khusus untuk bercinta sampai kehidupan mewah di dalam blok rutan. Syaripudin diganjar hukuman penjara karena kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan staf perusahaannya. Ia ditahan Polresta Jakarta Pusat tanggal 11 November 2007 sampai Januari 2008. Pada 16 Januari, Syaripudin dikirim ke Rutan Salemba dengan status tahanan titipan Kejaksaan. Selama mendekam di penjara, Syaripudin secara kebetulan menghuni Blok K yang merupakan blok khusus dihuni para napi korupsi. Menurut dia, Calon penghuni Blok K biasanya dipungut Rp 30 juta untuk menempati sebuah kamar dengan Fasilitas memadai, harga itu berlaku sampai dengan pembebasan “setiap bulan, penghuni wajib membayar uang kebersihan, keamanan, dan listrik sebesar Rp 1,25 juta,” katanya. Syaripudin menjelaskan, beberapa orang besar seperti Nurdin Halid pernah menghuni blok tersebut. Kondisi Blok ini sangat berbeda dengan Blok lain, disini tidak menggunakan pintu teralis. Pintu setiap ruangan baiknya sebuah pintu kayu rumah dan didalamnya terdapat fasilitas Ac, kulkas, dispenser, dan TV.

B. Pelaksanaan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013

Pembangunan barulah dapat terselenggara dengan baik apabila dilaksanakan oleh manusia yang baik pula, dan memberikan penciptaan kondisi yang memungkinkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal inilah pemasyarakatan penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pemasyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan sarana pembangunan. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep pemasyarakatan pada hakekatnya adalah pemasyarakatan yang ikut berperan di dalam pembangunan, sehingga iapun merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pembangunan.⁷⁶

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), narapidana berhak menerima pembinaan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Wujud pembinaan yang wajib diberikan kepada narapidana adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terkait dengan pengembangan karakter dan mental, sedangkan pembinaan kemandirian terkait dengan pengembangan bakat dan keterampilan narapidana. Sistem pemasyarakatan sebagai reaksi formal terhadap terpidana yang dikenal saat ini tidak lagi menggunakan

⁷⁶Polycarpus Bagus Widiharso Santoso, SH., "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana", Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN, hlm. 8.

konsep penjeraan sebagaimana yang dianut dalam sistem kepenjaraan melainkan telah beralih pada konsep pembinaan. Di dalam sistem ini terdapat 3 (tiga) unsur yang saling terkait guna mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, yaitu narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Jika salah satu unsur tidak memberi peran positif dalam proses pemasyarakatan, besar kemungkinan upaya pengentasan narapidana tidak akan berhasil.⁷⁷

Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakhirat. Dengan demikian penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, dapat dikemukakan bahwa Pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik, sesuai dengan pedoman dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pembinaan akhlak dan moral, budi pekerti, siraman rohani, latihan keterampilan, dan lain sebagainya. Pola pembinaan juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat. Namun belum maksimal sesuai dengan harapan, hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya prasarana dan

⁷⁷*Ibid*, hlm. 9.

sarana penunjang pembinaan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya perhatian/dukungan dari pemerintah daerah.⁷⁸

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelanggaran Tata Tertib

Proses pemasyarakatan, banyak terjadi berbagai permasalahan pada berbagai tahapan selama tahanan berada dalam Rutan maupun Lapas salah satunya yaitu kelebihan jumlah penghuni (*overcrowded*) yang berakibat terjadinya kerusuhan di beberapa Lapas maupun Rutan di Indonesia sebagai berikut:

- a. Kerusuhan terjadi pada 23 April 2016, Lapas Banceuy, Bandung. Kericuhan diduga karena para Napi tidak mendapat jawaban penyebab kematian salah satu rekan mereka. Negara diduga merugi hingga Rp6 miliar akibat peristiwa tersebut.
- b. Kerusuhan pada 21 April 2016 kerusuhan juga melanda Lapas Kerobokan, Bali. Kerusuhan di penjara berawal dari kedatangan 11 tersangka kasus pembunuhan di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Pembunuhan itu sendiri buntut dari kerusuhan di Lapas Kerobokan pada 17 Desember 2015. Pada kejadian tahun lalu itu lima orang tewas, dua di Lapas Kerobokan dan tiga di Jalan Teuku Umar.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 9.

Adapun faktor-faktor yang disebabkan dari dalam maupun luar lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan :

a. Faktor Internal.

Dalam pelaksanaan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang menjadi penghambat berjalannya pola pembinaan tersebut berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri antara lain:

1) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang minim dari pelaku tindak kejahatan sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri si pelaku. Sebagai contoh, seseorang yang berpendidikan formal hanya sampai tamat SD dibandingkan dengan seseorang yang tamat pendidikan formal SMA atau SMK, maka potensi pengembangan diri atau untuk mencari pekerjaan jauh lebih mudah yang tamatan SMA atau SMK dibandingkan yang tamatan SD.

2) Faktor Sifat dan Kepribadian

Faktor sifat dan kepribadian yang ada dalam diri narapidana itu sendiri menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup besar, mengingat perbedaan sifat, keseriusan dalam melaksanakan pembinaan, dan latar belakang yg berbeda-beda sangat

mempengaruhi jalannya pembinaan, sehingga sulit untuk menentukan jenis pembinaan yang cocok bagi masing-masing narapidana.

b. Faktor Eksternal

Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung, selain faktor internal yang menjadi penghambat jalannya pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung, ada faktor eksternal yang juga menjadi penghambat jalannya pola pembinaan tersebut antara lain :

1) Sarana Gedung Lembaga Pemasyarakatan

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana karena dari semuanya hal tersebut tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2) Kualitas dan Kuantitas Petugas

Adanya suatu usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di samping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin.

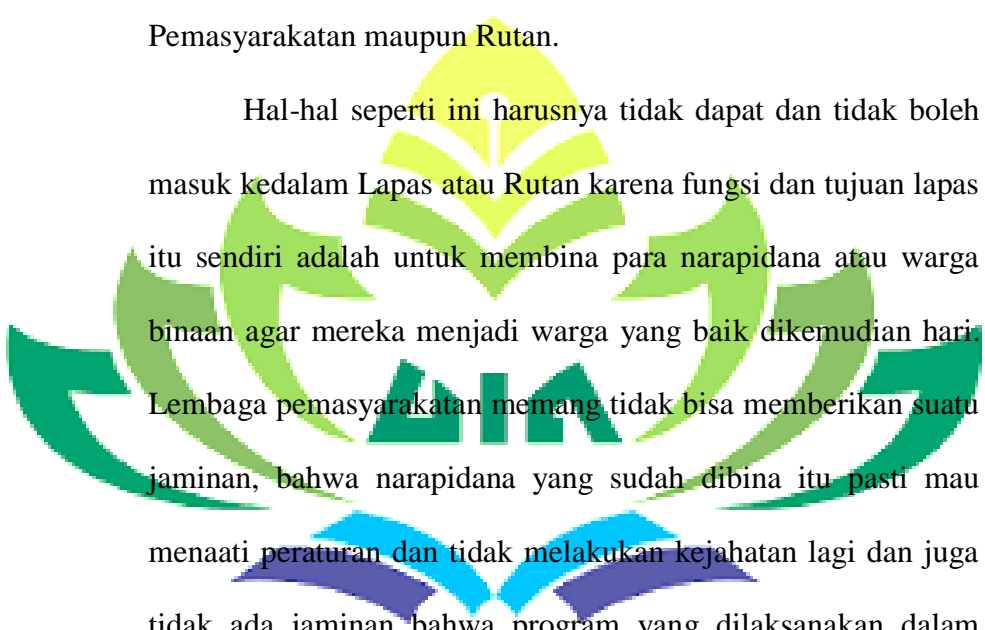
3) Sarana dan Fasilitas Pembinaan

Adanya kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan dan ketertiban. Hal tersebut merupakan tugas bagi semua pihak yang ada didalamnya baik itu Kepala Lembaga pemasyarakatan maupun staf yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, serta para Narapidana atau Tahanan untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana dan fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

4) Anggaran Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan dan melaksanakan semua program pembinaan, namun hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna, agar pembinaan dapat berjalan dengan baik.

5) Kualitas dan Ragam Program Pembinaan. Kualitas dari bentuk-bentuk program dari pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi tidak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal dalam pengerjaannya dan mudah cara kerjanya serta memiliki dampak yang edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan.

Uraian diatas dapat kita ketahui bahwa faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan maraknya terjadi tindak pidana di dalam Lapas maupun Rutan. Lapas maupun Rutan sejatinya adalah tempat bagi narapidana untuk memperbaiki diri atas tindak kejahatan yang telah mereka lakukan. Namun patut disayangkan masih saja terjadi tindakan-tindakan yang melanggar aturan yang dilakukan oleh narapidana bahkan oknum-oknum petugas yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rutan.



Hal-hal seperti ini harusnya tidak dapat dan tidak boleh masuk kedalam Lapas atau Rutan karena fungsi dan tujuan lapas itu sendiri adalah untuk membina para narapidana atau warga binaan agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari. Lembaga pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa narapidana yang sudah dibina itu pasti mau menaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi dan juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana pasti membawa hasil yang memuaskan. Dalam hal inilah keterlibatan pemerintah dan petugas pemasyarakatan serta masyarakat sangat diperlukan.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Terhadap Pelaksanaan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013

Beberapa uraian yang telah peneliti bahas diatas, dapat kita ketahui bahwa yang menyebabkan pelanggaran terhadap tata tertib di dalam lapas dan rutan disebabkan oleh beberapa faktor baik itu dari luar maupun dari dalam Lapas atau Rutan. Pemerintah khususnya melalui Kementerian Hukum dan Ham harus melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Hal yang dapat dilakukan bisa berupa hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran.

Upaya pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana dalam rangka pembinaan terhadap yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh petugas Lapas atau Rutan kepada Tahanan maupun Narapidana yang melakukan pelanggaran antara lain:

- a. Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan atau narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
- b. Menjebloskan kedalam sel pengasingan bagi setiap tahanan atau narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.
- c. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan atau narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran.⁷⁹

⁷⁹Polycarpus Bagus Widiharso Santoso, S.H, *Op. Cit*, hlm. 19.

Hal ini merupakan upaya yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tertib di Lapas maupun Rutan.

Melaksanakan tugas teknis pengamanan (penerimaan, penempatan, tahanan atau narapidana) petugas Lapas maupun Rutan harus melakukan:

- a. Pengawasan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan atau narapidana.
- b. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- d. Membuat laporan harian dan berita acara pemeriksaan keamanan.⁸⁰

Selain itu untuk memastikan ditaatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan.

Pembinaan Narapidana di dalam Lapas dan Rutan harus melibatkan empat komponen penting. Keempat komponen tersebut harus bekerjasama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Keempat komponen tersebut adalah:

⁸⁰C.I, Harsono, HS, *sistem baru pembinaan narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 49.

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri;
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat;
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar lapas dan rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat;
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Bispas, hakim wasmat dan lain sebagainya.⁸¹

Mengacu pada empat komponen diatas, pengendalian dan tanggung jawab terhadap pembinaan narapidana utamanya berada pada petugas Lapas dan Rutan yang lebih banyak bersentuhan dengan narapidana penjara, oleh karena itu petugas harus mencari atau memberi suasana yang harmonis sehingga terpidana itu selama menjalankan hukuman merasakan:

- a. Perasaan betah tinggal dalam tembok penjara yang berarti menerima sebagai suatu kenyataan sebagai suatu akibat dari suatu sebab. Perasaan betah tinggal disini bukan berarti kesenangan tetapi sikap menerima sebagai suatu keharusan.
- b. Perasaan aman, bahwa dilingkungan tembok penjara merasakan adanya perlindungan karena situasi tentram antara sesama penghuni maupun petugas dan tidak ada tekanan yang mengakibatkan kegelisahan.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 51.

- c. Menerima pelayanan artinya segala sesuatu yang diberikan sesuai dengan ketentuan diterima dengan senang.
- d. Adanya itikad baik dari penghuni baik individu maupun keseluruhannya untuk memperbaiki dirinya dan percaya bahwa perlakuan terhadapnya tidak hanya kepentingan hukum melainkan juga untuk kepentingan diri terpidana dan terpenjara.
- e. Segala sesuatu yang diberikan pada narapidana masih dalam batas yang sewajarnya, sehingga tidak menimbulkan suatu sikap yang memanjakan dan tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan prikemanusiaan.⁸²

Tim pengamat pemasyarakatan diberikan pula kewenangan untuk mempertimbangkan beberapa bentuk gangguan atas keamanan dan ketertiban tertentu untuk dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat.

Jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tingkat sedang dan berat secara tegas juga telah diatur dalam pasal 47 ayat(2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan:

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 hari bagi narapidana atau anak pidana;
dan atau

⁸²Sanusi Has, *Dasar-dasar Penologi*, (Medan: Monora, 1977), hlm. 83.

- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.⁸³



⁸³Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 47 ayat (2).

BAB IV

ANALISIS

C. Pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan menurut Permenkumham No 6 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah diatur mengenai kewajiban dan larangan bagi narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam Lapas atau Rutan.

Pelaksanaannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sering kali luput dari pengawasan petugas Lapas seperti halnya yang terjadi di Rutan Salemba yang merekam adanya praktik jual beli ruangan khusus untuk bercinta sampai kehidupan mewah di dalam blok Rutan. Dari kasus tersebut menurut penulis telah melanggar Pasal 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia dan dikenakan sanksi berupa Hukuman disiplin tingkat sedang yaitu memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 6 hari dan menunda atau meniadakan waktu pelaksanaan kunjungan.

Sementara itu di Lapas Cipinang ditemukannya sel mewah yang didalamnya terdapat satu unit laptop dan barang-baran elektronik lainnya hal ini tentu melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 4 huruf i dan j dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin tingkat berat yaitu memasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 hari dan

tidak mendapatkan remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Contoh diatas dapat kita ketahui masih terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam Lapas maupun Rutan yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri atau bahkan oknum-oknum petugas dari Lapas maupun Rutan di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan masih banyak diluar sana yang mungkin dalam prakteknya masih terjadi hal serupa. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat Lapas dan Rutan adalah merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan memantapkan iman (ketahanan mental) mereka dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Menurut peneliti yang menyebabkan terjadinya pelanggaran didalam Lapas dan Rutan yaitu adanya oknum-oknum dari petugas Lapas itu sendiri yang bermain dengan narapidana contohnya dalam hal pemberian fasilitas sel mewah, alat-alat elektronik seperti laptop, *handphone* dan lainnya.

Menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut pemerintah telah melakukan upaya-upaya dengan cara Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan atau narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan, Menjebloskan kedalam sel pengasingan bagi setiap tahanan atau narapidana yang pelanggarannya dianggap berat, Tidak

memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan atau narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran. Hal ini merupakan upaya yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Selain itu untuk memastikan ditaatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1 x 24 jam. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan.

Menurut pandangan peneliti langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah tersebut sudah baik dalam upaya menekan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Lapas maupun Rutan namun agar ketertiban dalam Lapas dan Rutan dapat terselenggara dengan optimal pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap berpegang teguh dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia dan lebih memperketat lagi pengawasan dalam Lapas maupun Rutan dan menindak tegas bagi pejabat-pejabat atau petugas-petugas yang terlibat didalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga hukum dapat ditegakkan dengan adil.

Menurut pandangan peneliti dari kasus-kasus yang selama ini terjadi di dalam lapas maupun rutan ada beberapa pihak yang diistimewakan dalam hal ini yaitu bisa dilihat dari kasu-kasus yg telah dibahas. Hal tersebut bila terus berlangsung tentu sangat mencoreng nilai-nilai keadilan itu sendiri

karena bagaimanapun juga semua orang di mata hukum itu sama tidak boleh tebang pilih antara satu dengan yang lainnya.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia

Lapas atau Rutan yang sering disebut dengan penjara sudah ada sejak zaman Nabi dan para sahabatnya. Telah dimaklumi bersama bahwa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq tidak membuat penjara dalam tempat tertentu, tapi hanya dirumah atau diikat di salah satu pagar masjid dan sebagainya. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab rakyat semakin banyak dan khilafah Islamiyah semakin menyebar, beliau membeli rumah shafwan bin umayyah yang di mekkah dengan 4ribu dirham dan menjadikannya sebagai tempat penjara. Maka tercatatlah Umar bin Khattab sebagai orang pertama kali membuat penjara dalam Islam.

Islam memiliki konsep tentang penjara yaitu:

1. Islam tidak pernah mencampurkan antara *Takzir* dengan hukum yang sudah ada didalam Al-Quran. Hukum yang sudah ditetapkan didalam Al-Quran misalnya adalah *Qishas*.
2. Narapidana tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan hak-haknya berupa mendapatkan cahaya matahari, air, udara, pendidikan, serta kebutuhan biologis.

Dalam *Khazanah* Hukum Islam, pidana penjara secara etimologi berarti mencegah dan menahan.

Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Disamping itu juga sebagai pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan perbuatan *jarimah*, sebab ia mengetahui hukuman yang diterima bila ia melakukan perbuatan serupa.

Hukum pidana Islam sebagai sebuah sistem hukum, mempunyai tiga aspek kajian yakni tindak pidana (*Rukn al-amali*), pertanggungjawaban pidana (*Rukn al-madi*), dan hukuman (*Rukn al-syar'i*). Tiga aspek tersebut harus dipahami sehingga akan menggambarkan hukum pidana Islam sebagai sebuah sistem Hukum yang universal. Banyak umat Islam yang memahami Hukum Islam hanya dilihat dari satu rukun yakni rukun syariat seperti hukum mati, potong tangan, rajam, penjara, dan jilid (terpidana dipukul dengan rotan). Padahal hukum pidana Islam juga membahas tentang pertanggung jawaban pidana dan perbuatan pidana.

Islam mengajarkan kasih sayang kepada setiap umatnya dan tidak membedakan antara satu dengan yang lain baik hubungan antara satu sama lain bahkan Islam juga mengajarkan untuk bersikap lemah lembut dan baik terhadap tahanan. Prinsip dan etika Islam terhadap para narapidana ialah berkelakuan baik. Perlakuan yang baik terhadap narapidana merupakan tuntunan Islam yang luhur. Ini sesuai dengan seruan Al-Qur'an dalam surat Al-Insaan ayat 8, yang artinya : “*dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan*”.⁸⁴

⁸⁴ Al Quran dan Terjemahannya, *Op. Cit*, hlm. 1004.

Penjelasan ayat diatas dijelaskan bahwa perlakuan yang baik itu meliputi jaminan atas makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan ucapan yang pantas. Hal tersebut merupakan kelaziman yang harus dipenuhi oleh otoritas setempat dalam hal ini yaitu petugas Lapas atau Rutan. Rasulullah SAW. dan para sahabat konon selalu memberi makan pagi dan malam bagi para tahanan dengan menu yang sama seperti roti dan kurma.

Demikian pula mengenai hunian meskipun mereka merupakan narapidana, sepatutnya sel yang mereka huni minimal layak bahkan zaman sahabat dulu mereka ada yang ditahan di masjid atau kediaman mereka.

Pada kenyataannya sistem pemenjaraan di lapas dan rutan kita saat ini khususnya dari segi sarana dan prasarannya masih banyak yang belum memadai sehingga menimbulkan masalah-masalah yang sering terjadi di dalam lapas atau rutan contohnya seperti kerusakan, melarikan diri dari lapas atau rutan dan sebagainya. Hal ini harusnya jadi perhatian khusus bagi pemerintah agar memperhatikan hak-hak narapidana sesuai dengan ajaran Islam.

Narapidana juga semestinya harus menaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dalam Surat An-Nisa ayat 59 Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu*

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” .⁸⁵

Penjelasan diatas sudah dijelaskan bahwa setiap umat wajib menaati pemimpinnya dalam kasus ini narapidana yang berada di dalam lapas atau rutan sudah semestinya wajib dan taat terhadap aturan yang dibuat pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM selama aturan yang dibuat tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam dan lebih banyak kemaslahatan dibanding kemudharatannya Sehingga dapat terlaksananya tata tertib yang ada di lapas maupun rutan, demi terciptanya rasa keadilan sesama narapidana.

Hukuman penjara mestinya hanyalah sebagai hukum yang menjadi penguat dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah SWT. sedangkan penjara, pengasingan atau sanksi hukum lainnya hanyalah pelengkap. untuk itu hukum Islam memandang efektivitas hukuman seperti penjara atau lainnya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Penjara bukan satu-satunya media untuk menyadarkan dan menjerakan seseorang untuk berhenti melakukan pelanggaran hukum.

Lapas atau rutan seharusnya menjadi tempat narapidana untuk dibina menjadi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga ketika mereka terjun ke dalam masyarakat nanti diharapkan mereka sudah menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Hal ini pemerintah selaku pembuat aturan menurut penulis belum dapat berlaku secara adil dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan

⁸⁵ Al Quran dan Terjemahannya, *Op. Cit*, hlm. 128.

tata tertib yang ada di Lapas maupun Rutan masih belum terlaksana secara sepenuhnya hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus yang marak terjadi di lapas maupun rutan. Pemerintah khususnya pegawai lapas atau rutan lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum dibanding kepentingan pribadi sehingga terciptanya kesejahteraan di dunia maupun akhirat.



BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisis mengenai pelaksanaan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013

Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia adalah aturan yang harus ditaati dan ditegakkan oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana yang ada di Indonesia. Proses pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh kurangnya atau minimnya sarana dan prasarana yang ada didalam Lapas atau Rutan, dan narapidana serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah selaku pembuat aturan harus tegas dan adil dalam menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut, agar tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlakuan istimewa daripada narapidana yang lainnya hal ini demi terwujudnya rasa keadilan sesama penghuni Lapas maupun Rutan sehingga Tata Tertib yang ada di Lapas maupun Rutan dapat terlaksana dengan baik demi terciptanya keadilan bagi sesama narapidana. Sedangkan bagi narapidana itu sendiri wajib menaati aturan-aturan yang ada di Lapas maupun Rutan di Indonesia.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia belum bersikap baik dan adil terhadap narapidana. Di dalam ajaran Islam petugas Lapas atau Rutan harus bersikap adil terhadap semua narapidana dan wajib memenuhi hak-hak dan kewajiban narapidana di dalam Lapas maupun Rutan di Indonesia. Hal ini demi terciptanya kemaslahatan bersama.

D. Saran

Setelah peneliti mengkaji tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia serta melakukan analisis maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM dan petugas-petugas Lapas yang ada di Indonesia agar senantiasa berpegang teguh terhadap aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia. Penulis juga menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang masih minim atau kurang yang ada di Lapas maupun Rutan serta para narapidana dan petugas yang kedapatan melakukan pelanggaran tersebut agar ditindak secara tegas tanpa pandang bulu.
2. Bagi Narapidana agar menaati aturan yang sudah berlaku demi menciptakan rasa keadilan sesama narapidana karena pada dasarnya Lapas atau Rutan merupakan tempat mereka untuk memperbaiki diri dan

menebus kesalahan sehingga ketika mereka terjun kemasyarakat nanti dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A Budiarsyah, *Tinjauan Pustaka*, (On-line), Tersedia di [Http://www.digilib.unila.ac.id.html](http://www.digilib.unila.ac.id.html). Minggu 3 Februari 2019 Pukul 20.40 WIB.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004).
- Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, cet. Ke-4).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar. 1997).
- Al-Mawardi, "*al-Ahkam al-Sulthaniyyah*", (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp).
- C. Djisman Samosir, "*Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*", (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).
- C.I, Harsono, HS, *sistem baru pembinaan narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995).
- Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I, (Jakarta: UI Press, 1993).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004).
- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, "*Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*", (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985).

Kompas. Com “Sel Mewah dihargai Rp 30 Juta”, (On-line), tersedia di: <https://search.kompas.com/search/?q=sel+dihargai+30+juta.html>,

Hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 Pukul 14:22 WIB.

Kompas. Com, “*Kasus Lapas Mewah, Kepala dan KPLP Lapas Cipinang dicopot*”

<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/10570411/kasus.lapas.mewah.kepala.dan.kplp.lapas.cipinang.dicopot.html>, Selasa Tanggal 15 Januari 2019 Pukul 15.30 WIB.

M. Soleh Bajuri, “*Menggagas Paradigma Ushul Al-Fiqh Alternatif Dan Pengembangan studi Hukum Islam*”, *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. X, No. 4 Juli 2012, (Medan: Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara, 2012), hlm. 460. (On-line), tersedia di: <http://www.ejournal.ac.id/index.php/adalah.html>. (13 Maret 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidat Wa Syari’at*, (Kairo: Dar al-Qalam, Cet. III, 1996).

Mohammad Daud Ali, “*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*” Edisi Ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998).

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, terj. Muhammad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001).

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996).

Muhammad Fuad Abdul Baqi, “*Al-Lu’lu’ Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*”, (Elex Media Komputindo, 2017).

Muhammad Iqbal, “*Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum, “*Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan Dibeberapa Negara*”, (Badan

- Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2016).
- Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
- Petter Salim, M. A., Yunny Salim, B. Sc. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991).
- Polycarpus Bagus Widiharso Santoso, SH., “*Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana*”, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN.
- Sanusi Has, *Dasar-dasar Penologi*, (Medan: Monora, 1977).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1985).
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).